

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Melalui Partisipasi Masyarakat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka

Rifaha Mabakotawasi

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Nurhasanah

Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Fenny Adnina Daulay

Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana masyarakat telah mendukung penerapan pendidikan inklusif di SDN Poka 3 Kota Ambon. Penelitian ini menggabungkan metodologi studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Untuk menjaga keaslian data, triangulasi sumber digunakan bersama dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Di SDN Poka 3, keterlibatan masyarakat memiliki banyak bentuk, menurut temuan penelitian. Bentuk-bentuk tersebut meliputi: keterlibatan dalam perencanaan pendidikan melalui rapat komite sekolah dan forum komunikasi guru-orang tua; pelaksanaan program melalui kerja sama dalam membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) di rumah dan di sekolah; serta supervisi dan evaluasi melalui pertemuan rutin dan kegiatan pemantauan kooperatif. Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga terlihat dalam bentuk fasilitasi pelatihan dan workshop bagi guru dan orang tua. Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya pemahaman sebagian orang tua tentang konsep pendidikan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan sosialisasi, pelatihan, serta penyediaan fasilitas pendukung agar program pendidikan inklusi dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif.

Implementation of Inclusive Education Through Community Participation in State Elementary Schools (SDN) 3 Poka

Abstract: The purpose of this study is to describe how the community has supported the implementation of inclusive education at SDN Poka 3 Ambon City. This research combines case study methodology with a qualitative approach. To maintain the authenticity of the data, source triangulation is used in conjunction with interviews, documentation, and observation as a method of data collection. At SDN Poka 3, community involvement takes many forms, according to the study's findings. These forms include: involvement in educational planning through school committee meetings and parent-parent communication forums; program implementation through cooperation in helping children with special needs (ABK) at home and at school; as well as supervision and evaluation through regular meetings and cooperative monitoring activities. Support from Non-Governmental Organizations (NGOs) is also seen in the form of facilitation of training and workshops for teachers and parents. Nevertheless, the implementation of inclusive education still faces obstacles in the form of limited infrastructure facilities and the lack of understanding of some parents about the concept of inclusive education. This study

recommends increasing socialization, training, and provision of supporting facilities so that inclusive education programs can run more optimally.

Keywords: *Community participation, children with special needs, inclusive education.*

Korespondensi: Wahyuni Romain. Email: rifahamabakotawasi@gmail.com

Pendahuluan

Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia merujuk pada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai keadilan dan kesetaraan, serta mendapatkan peluang dan manfaat yang sama. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 serta Pasal 32, yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus.

Pendidikan khusus ini ditujukan bagi peserta didik yang mengalami gangguan fisik, mental, emosional, intelektual, sosial, maupun yang memiliki kecerdasan luar biasa, dan dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melalui Pasal 10 mengharuskan semua jalur dan jenjang pendidikan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Mendukung hal tersebut, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif untuk Peserta Didik yang memiliki Disabilitas serta Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ditegaskan bahwa mereka berhak mengikuti pendidikan inklusif sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Institusi pendidikan juga diwajibkan menyusun kurikulum yang beragam dan menyesuaikan dengan karakteristik sekolah, potensi daerah, serta kebutuhan peserta didik, sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Setelah debat presiden kelima pada 4 Februari 2024, topik pendidikan inklusif kembali mengemuka. Salah satu elemen utama tema pendidikan dan inklusi dalam diskusi tersebut adalah pendidikan inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus wajib bersekolah di sekolah setempat dan berpartisipasi dalam kelas

reguler bersama teman-temannya sebagai bagian dari program pendidikan inklusif (Kementerian Pendidikan, 2021)

Pendidikan penting bagi setiap individu dalam mencapai kesejahteraan sosialnya. Tidak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dari segi fisik maupun mentalnya. Namun pada kenyataannya di lapangan anak-anak yang kurang beruntung sering mendapatkan pengecualian dalam mendapatkan pendidikan. Eksklusivitas dalam pendidikan menutup kesempatan bagi mereka. sikap eksklusivitas tentunya membuat anak yang memiliki kekurangan atau anak berkebutuhan khusus semakin dikucilkan dan terpinggirkan. Tujuan terbentunya sekolah inklusif yaitu menekan dampak yang diakibatkan dari sikap eksklusivitas. Sekolah inklusif juga memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mengenyam pendidikan (Wasliman, 2019).

Tujuan pendidikan inklusif adalah menjunjung tinggi hak yang sama bagi setiap orang atas pendidikan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnis, bahasa, disabilitas, dan karakteristik lainnya. Setelah Konvensi Dunia tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan di Bangkok tahun 1991, pendidikan inklusif menjadi topik hangat (Dyah, 2008).

Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan manfaat dari pendidikan inklusif karena sejumlah alasan, termasuk: 1) Setiap anak, dengan atau tanpa disabilitas, memiliki hak untuk belajar bersama anak-anak lain. 2) Anak-anak harus dipandang memiliki tantangan belajar alih-alih diklasifikasikan atau dibedakan secara ketat. 3) Tidak ada alasan yang baik untuk memisahkan anak-anak di sekolah. Ada harapan bahwa anak-anak akan bersama. Mereka tidak pernah berusaha membela diri terhadap orang lain. 4.) Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang berada di lingkungan bersama lebih mungkin untuk berprestasi baik secara sosial dan akademis. 5.) Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu bekerja dengan siswa di

sekolah reguler. 6.) Setiap anak harus menerima pendidikan yang memupuk interaksi interpersonal dan memperlengkapi mereka untuk kehidupan komunal. 7) Satu-satunya cara untuk mengurangi rasa takut dalam menjalin persahabatan, mengambil tanggung jawab, dan memahami diri sendiri adalah melalui pendidikan yang komprehensif (Purwanta, 2009).

Ambon mulai menerapkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas setelah pengumuman dan penandatanganan nota kesepahaman dengan UNESCO pada 6 September 2014 yang membahas kota inklusif. Tidak terkecuali Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka sendiri telah berdiri pada tahun 1987, dan mulai menjalankan sekolah Inklusif pada tahun 2008 hingga saat ini. Siswa disabilitas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka berjumlah 15 orang, antara lain Difabel, lambat bicara, lambat belajar, dll.

Memang benar bahwa masyarakat tidak menyukai pendidikan inklusif. Masyarakat berfokus pada peningkatan standar pendidikan, baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, anak-anak berkebutuhan khusus seringkali terpinggirkan. Mereka tidak boleh diabaikan karena mereka memiliki hak yang sama atas pendidikan, meskipun layanan pendidikan ini membutuhkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait "Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka".

Kajian Teori

Pendidikan inklusif bertujuan untuk membentuk lingkungan yang mendukung dan terbuka bagi setiap individu, tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, kepribadian, status sosial, etnis, budaya, dan latar belakang lainnya. Strategi ini berkembang ketika gagasan tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum satuan pendidikan untuk mengubah pendidikan inklusif menjadi sistem layanan pendidikan yang menawarkan setiap siswa kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada, pendidikan inklusif disusun sebagai suatu sistem layanan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah reguler yang berada di

lingkungan tempat tinggal mereka bersama teman sebaya. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan terbaik bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam penerapannya, sekolah dituntut untuk menyesuaikan kurikulum, sarana prasarana, serta metode pengajaran agar dapat mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, agar program pendidikan yang diterapkan bersifat relevan dan adil, diperlukan keterlibatan tenaga profesional yang kompeten untuk melakukan identifikasi dan penilaian secara tepat.

1. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

a. Perencanaan Pembelajaran

Proses penyusunan program dan prosedur pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus dikenal sebagai perencanaan pembelajaran. Profil pembelajaran dan hasil asesmen siswa digunakan untuk merancang program pembelajaran.

Masalah-masalah berikut dapat dipertimbangkan saat membuat perubahan pada cara alur tujuan dan modul pembelajaran sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan profil pembelajaran siswa berkebutuhan khusus dan hasil asesmen.
- 2) Tetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan persyaratan siswa berkebutuhan khusus.
- 3) Tetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan persyaratan dan keadaan anak berkebutuhan khusus. Format lain dapat dibuat oleh guru agar sesuai dengan kebutuhan siswanya.
- 4) Buat rencana pembelajaran yang mempertimbangkan persyaratan dan keadaan siswa berkebutuhan khusus. Guru dapat mengembangkan format tambahan yang mendukung modul pembelajaran dengan menggunakan contoh-contoh dalam lampiran buku panduan ini.

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan pendidikan inklusif adalah:

- a. Pendidikan inklusif bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh peserta didik, termasuk

- mereka yang memiliki kecerdasan tinggi atau bakat khusus, agar dapat memperoleh pendidikan yang optimal dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing, tanpa membedakan kondisi fisik, emosional, mental, maupun sosial yang dimiliki.
- b. Menyadari bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan cara yang menghargai keberagaman dan tidak mendiskriminasi siswa mana pun.
 - c. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk: (1) Memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, agar dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing; (2) Mendukung percepatan pelaksanaan program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar; (3) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar sekaligus menurunkan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4) Mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Tujuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51, menyatakan bahwa anak dengan kebutuhan khusus secara fisik dan/atau mental berhak mendapatkan kesempatan dan akses yang setara untuk mengikuti pendidikan umum maupun pendidikan khusus.
 - d. Menurut Herawati, pendidikan inklusif bertujuan untuk: 1) Memberikan akses pendidikan yang

seluas mungkin bagi semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, agar mereka dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing; 2) Mendukung percepatan pelaksanaan kurikulum wajib pada jenjang pendidikan dasar 3) Mengurangi angka putus sekolah dan mengulang kelas agar dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah (Herawati, 2021)

3. Prinsip Sekolah Inklusif

Pendidikan inklusif didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar, dan bahwa keberagaman di antara mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensi masing-masing. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaannya adalah keterlibatan aktif siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas, sehingga mereka dapat diterima dan ikut berpartisipasi di lingkungan sekolah. Kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik tiap peserta didik. Berdasarkan prinsip adaptasi, lembaga pendidikan harus mempertimbangkan tiga faktor dalam penerapan pendidikan inklusif: kurikulum, pembelajaran, dan lingkungan belajar (ekologis).

- a. Adaptasi kurikulum mencakup perubahan pengetahuan, sumber daya yang diperoleh siswa. Guru dapat mengganti kompetensi lain dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi target atau menambahkan kemampuan baru untuk menggantikannya dalam modifikasi kurikulum. Penyederhanaan kompetensi yang ingin dicapai merupakan penyesuaian lain yang dapat dilakukan oleh pendidik. Berdasarkan hasil asesmen, proses penyederhanaan bergantung pada keterampilan awal, keadaan, dan gaya belajar siswa. Selama proses modifikasi kurikulum, satuan pendidikan perlu:
 - 1) Mudah beradaptasi dan kreatif;
 - 2) Memastikan kebijakan sekolah inklusif dikembangkan;

- 3) Memodifikasi kurikulum, merumuskan rencana kelas, menetapkan tujuan pembelajaran yang transparan dan tidak ambigu, memanfaatkan teknik pengajaran alternatif, memanfaatkan teknologi yang tepat, dan merencanakan ke depan;
 - 4) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan ruang fisik nyaman; dan
 - 5) Mengembangkan kolaborasi dengan bekerja sama dalam tim.
- b. Adaptasi pembelajaran merujuk pada berbagai metode, pendekatan, dan strategi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mendukung siswa dalam mencapai kompetensi atau materi yang diharapkan. Dalam hal ini, guru memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di setiap kelas, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- c. Penataan lingkungan belajar (di mana, kapan, dan dengan siapa pembelajaran berlangsung) serta penyediaan sumber daya dan alat bantu belajar yang memenuhi kebutuhan peserta didik, semuanya berkaitan dengan penyesuaian lingkungan belajar.

Model-model berikut dapat digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum dan adaptasi pengajaran:

- 1) Eskalasi/akselerasi: program pendidikan yang meningkatkan waktu belajar dan penguasaan materi. Kandidat utama untuk model ini adalah siswa dengan kecerdasan, bakat, dan kecepatan belajar yang luar biasa.
- 2) Duplikasi: Berdasarkan model duplikasi, siswa PDBK mengikuti kurikulum yang sama dengan siswa non-PDK pada umumnya. Mereka tetap dapat mengikuti kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan karena tantangan yang mereka hadapi mungkin tidak terlalu besar.
- 3) Penyederhanaan atau modifikasi: kurikulum secara keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK, namun tetap ramping tanpa mengorbankan

konten. Kurikulum dapat disederhanakan dan dimodifikasi dalam satu atau beberapa bidang berikut: metode, tujuan, konten, dan teknik penilaian.

- 4) Substitusi: Sebagian kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Anak-anak dengan gangguan penglihatan, misalnya, tidak selalu perlu diberikan kegiatan menggambar; mereka dapat digantikan dengan kegiatan lain yang setara, seperti bernyanyi atau membuat patung dari bahan lunak. Anak-anak dengan gangguan pendengaran, misalnya, mungkin tidak memerlukan kursus pemahaman mendengarkan; sebagai gantinya, mereka dapat terlibat dalam kegiatan yang setara seperti membuat atau menulis cerita.
- 5) Kelalaian: Untuk mengakomodasi karakteristik dan keterampilan anak berkebutuhan khusus, sebagian besar kurikulum reguler dihilangkan. Kurikulum yang unik dan disesuaikan dapat diberikan kepada mereka sesuai dengan hasil proses identifikasi dan evaluasi.

1. Ciri-ciri Anak Berkebutuhan Khusus

a) Anak dengan hambatan penglihatan/Tunanetra

Anak-anak dengan gangguan penglihatan adalah mereka yang mengalaminya hingga membutuhkan pendidikan khusus dan bantuan hidup. Jika bidang penglihatan siswa kurang dari 20 diameter atau mereka tidak dapat melihat objek sejauh 6 meter di depan mereka, mereka dianggap mengalami gangguan penglihatan. Kategori-kategori tersebut adalah: Individu dengan penglihatan rendah mengalami penglihatan kabur saat menatap objek, sementara mereka yang buta total tidak dapat melihat rangsangan cahaya eksternal apa pun.

b) Anak dengan hambatan pendengaran/Tunarungu

Berbagai tingkat gangguan pendengaran atau malfungsi, yang mengakibatkan kesulitan berbahasa, merupakan karakteristik anak-anak

dengan gangguan pendengaran. Siswa dengan gangguan pendengaran diklasifikasikan sebagai tuli jika skor audiometer mereka 91 dB atau lebih tinggi, dan sebagai sulit mendengar jika skor mereka antara 27 dan 90 dB. Mereka seringkali tidak memiliki masalah intelektual, tetapi mereka mengalami kesulitan komunikasi dan keterlambatan bahasa. Meskipun modifikasi diperlukan, terutama untuk mengatasi hambatan bahasa melalui pembelajaran bahasa yang lebih dini, mereka dapat tetap mengikuti kurikulum normal.

c) Anak dengan hambatan intelektual/Tunagrahita

Anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda disabilitas intelektual atau retardasi yang jelas, yang menyulitkan mereka untuk menjalankan tugas sosial dan skolastik, dianggap memiliki disabilitas intelektual. Jika seseorang menunjukkan tiga karakteristik, mereka dianggap memiliki disabilitas intelektual: a. keterlambatan fungsi intelektual umum atau perkembangan kecerdasan mental yang jauh di bawah usia kronologis mereka; b. kesulitan dengan perilaku sosial/adaptif; dan c. terjadi pada usia perkembangan maksimal hingga 18 tahun. IQ (intelligence quotient) adalah hasil tes kecerdasan yang menentukan tingkat kecerdasan seseorang.

2) Anak berkesulitan belajar spesifik (*specific learning disability*)

Seseorang dianggap memiliki ketidakmampuan belajar jika, setelah tes IQ, mereka memiliki skor rata-rata atau di atas rata-rata tetapi menunjukkan hasil belajar (dalam bidang tertentu) yang jauh di bawah usia dan kapasitas mental mereka. Guru sering menangani anak-anak yang memiliki tantangan atau ketidakmampuan belajar ketika memberikan pelajaran di sekolah biasa. Secara umum, ada dua jenis pengelompokan murid yang berjuang dengan pembelajaran. Bahasa dan komunikasi, memori, perilaku sosial, masalah motorik dan persepsi, dan ketidakmampuan belajar perkembangan

adalah yang pertama. Menurut bakat mereka, yang kedua berkaitan dengan keterampilan skolastik (membaca, menulis, dan matematika). Namun, karena saling ketergantungan mereka, kedua kelompok ini tidak dapat sepenuhnya dipisahkan (Kirk dan Gallagher, 1986). Meskipun mereka perlu dimodifikasi (kurikulum yang diadaptasi), mereka dapat mematuhi kurikulum reguler.

a) Anak cerdas istimewa dan bakat istimewa

Jika seseorang mendapatkan skor di atas rata-rata pada tes kecerdasan konvensional dan memiliki daya cipta serta dedikasi di atas rata-rata terhadap tugas, mereka dianggap luar biasa pintar dan/atau sangat berbakat. Ketika bakat seseorang melampaui tahap perkembangan rekan-rekannya dan terutama terlihat dalam bidang akademik, olahraga, seni, dan/atau kepemimpinan tertentu, mereka dianggap sangat berbakat.

b) Anak *autistic spectrum disorders* (ASD)

Gangguan Spektrum Autisme (ASD) berasal dari kata "auto", yang berarti "sendiri". Anak dengan ASD sering digambarkan berada di dunianya sendiri. Sebagai disabilitas perkembangan yang memengaruhi individu selama masa pertumbuhan dan perkembangannya, autisme ditandai oleh ciri-ciri penting seperti perilaku, interaksi, dan komunikasi yang buruk. Berbeda dengan jenis kebutuhan khusus lainnya, yang sering dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, *autisme* dikategorikan berdasarkan ciri-ciri yang termasuk dalam "spektrum".

c) Anak *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD)

Istilah hiperaktivitas sering kali digunakan sebagai sinonim dari ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*), yaitu kondisi yang menggambarkan gangguan emosional dan perilaku pada anak. Anak-anak dengan kondisi ini umumnya menunjukkan satu atau lebih dari tiga ciri utama, yaitu: a) sulit untuk fokus atau mempertahankan perhatian dalam jangka waktu tertentu; b) aktivitas

fisik yang berlebihan atau kesulitan untuk tetap tenang; dan c) perilaku impulsif, yaitu bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Misalnya, melamun, pelupa, tidak bertanggung jawab, apatis, kegagalan untuk menyelesaikan kegiatan, dan menghindari tugas-tugas yang menantang adalah semua tanda-tanda kesulitan perhatian. Perilaku gelisah, bangun dari posisi duduk, mengalami kesulitan untuk tetap diam, mengalami kesulitan menahan diri, mengobrol berlebihan, berlari, dan memanjat dengan tidak tepat adalah semua tanda-tanda hiperaktivitas. Antara lain, impulsivitas bermanifestasi sebagai kecenderungan untuk menyela orang, menjawab pertanyaan sebelum selesai, atau mengalami kesulitan menunggu giliran.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif yaitu berupaya demi mendapatkan serta memvisualkan data-data baik berupa kata-kata atau gambar dengan cara menjelaskan atau menguraikan setiap kegiatan yang dilakukan (Anggito dan Setiawan, 2018). Selain itu penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berusaha memahami fenomena sosial dengan lebih mendalam, dengan fokus pada pengertian dari makna yang terdapat dalam konteks atau narasi-narasi tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang dihimpun berupa informasi non-numerik seperti teks dan gambar. Hasil penelitian akan disajikan dengan menyertakan kutipan langsung dari data untuk mendukung isi laporan. Sumber data dapat mencakup transkrip wawancara, catatan observasi di lapangan, dokumentasi berupa foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di SD Negeri 3 Poka, ditemukan beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, terutama orang tua siswa, tokoh

masyarakat, dan komite sekolah, memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Temuan ini berfokus pada (Rahmani dan Humaedi, 2019):

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka.

a. Partisipasi dalam Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa Ibu Taty Salampessy di sekolah SDN 3 Poka menyatakan:

“Saya merasa cukup terlibat, terutama melalui pertemuan orang tua dan komunikasi dengan guru. Namun, kadang saya merasa kurang tahu bagaimana membantu anak saya belajar di rumah, terutama karena kebutuhan khusus yang dimilikinya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif cukup baik, khususnya melalui kehadiran dalam pertemuan dan komunikasi dengan guru. Namun, orang tua masih mengalami kendala dalam memberikan bantuan belajar di rumah, terutama karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang cara mendampingi anak berkebutuhan khusus secara tepat. Dengan ini menunjukkan perlunya dukungan dan bimbingan lebih lanjut dari pihak sekolah kepada orang tua.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lingkungan SDN 3 Poka untuk melihat secara nyata bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Hasil observasi menunjukkan beberapa temuan dalam partisipasi perencanaan dalam bentuk rapat orang tua siswa dan pihak sekolah:

1. Kehadiran Orang Tua dalam Kegiatan Sekolah

Dalam beberapa pertemuan sekolah seperti rapat komite, parenting class, dan hari inklusi, orang tua siswa-baik dari anak berkebutuhan khusus maupun siswa reguler-turut hadir aktif. Mereka ikut mendengarkan arahan guru, berdiskusi tentang perkembangan anak, serta memberikan masukan bagi kebijakan sekolah.

2. Interaksi Guru-Orang Tua di Kelas Inklusif

Peneliti mengamati bahwa guru-guru SDN 3 Poka terbiasa membangun komunikasi dua arah dengan orang tua siswa inklusif. Guru tidak hanya menyampaikan perkembangan akademik anak, tetapi juga memberikan saran terkait aktivitas belajar yang bisa dilakukan di rumah. Beberapa orang tua bahkan ikut membantu secara langsung dalam kelas Untuk memperkuat data dari wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen fisik dari pihak sekolah, antara lain:

Hal ini juga diperkuat oleh peran LSM lewat wawancara bersama Ibu Ace Kastanya S.Pd yang terlibat bersama pihak sekolah:

“Kami memulai dengan asesmen awal di sekolah untuk mengetahui kebutuhan. Setelah itu kami menyusun rencana kerja bersama pihak sekolah, melibatkan guru, kepala sekolah, dan komite.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 3 Poka diawali dengan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Selanjutnya, disusun rencana kerja secara kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, seperti guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan terpadu dan partisipatif dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif.

2. Pelaksanaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka

Hal ini disampaikan langsung lewat wawancara oleh Ibu Tabitha Komas S.Pd menyatakan:

“Jadi sebelum masuk itu biasanya anak diberikan asesmen diagnostik. Jadi kita harus tahu itu anehnya seperti apa, nah pelayanannya harus sesuai dengan kebutuhan anak.”

Sekolah melakukan asesmen diagnostik kepada setiap anak sebelum diterima untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi khusus anak tersebut, sehingga pelayanan pendidikan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

a. Strategi Pembelajaran Inklusif

Siswa berkebutuhan khusus tidak dipisahkan dari siswa lain. Mereka tetap belajar bersama dalam satu kelas, tetapi dengan pelayanan pembelajaran yang

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa.

Hal ini disampaikan langsung lewat wawancara bersama Ibu Diana Taher selaku komunitas sekolah.

“Diberikan pembelajaran yang sesuai dengan dia. Supaya dia bisa berkembang biar sedikit demi sedikit.”

Berdasarkan penyampaian informan bahwa sekolah memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar anak dapat berkembang secara bertahap sesuai potensinya.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 3 Poka berjalan dengan pendekatan terbuka dan berorientasi pada pemenuhan hak belajar bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Temuan-temuan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi adalah sebagai berikut (Nurfadhillah, 2021):

- 1) **Penerimaan Siswa Tanpa Diskriminasi.**
Sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus dari berbagai latar belakang tanpa melakukan penolakan. Proses asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kebutuhan khusus setiap siswa agar dapat diberikan layanan yang sesuai.
- 2) **Strategi Pembelajaran Individual dan Inklusif.**
Siswa ABK tetap dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran bersama siswa reguler. Namun, mereka juga mendapat perhatian khusus, baik dalam bentuk materi yang disesuaikan maupun pendampingan tambahan.
- 3) **Tantangan Pelaksanaan.**
Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih secara khusus serta minimnya sarana dan prasarana seperti alat bantu belajar atau fasilitas penunjang lainnya. Untuk mengatasi hal ini, sekolah bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai mitra dalam memberikan masukan atau dukungan teknis.
- 4) **Upaya Keberlanjutan.**

Sekolah memberikan pelayanan maksimal kepada siswa ABK dan memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang juga inklusif. Strategi ini menegaskan komitmen sekolah terhadap keberlangsungan pendidikan inklusi.

Partisipasi masyarakat, khususnya orang tua siswa dan lingkungan sekitar, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi di SDN 3 Poka. Temuan yang relevan dengan partisipasi masyarakat meliputi (Rizkiana dan Alhabsyi, 2021):

- 1) Sosialisasi Pendidikan Inklusif. Sekolah secara rutin melakukan sosialisasi kepada orang tua murid pada saat pertemuan sekolah. Topik pendidikan inklusi selalu menjadi bagian dari pembahasan, sehingga orang tua paham pentingnya pendidikan yang setara untuk semua anak.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama komunitas sekolah Ibu Tabitha Komar, menyatakan:

“Jadi, biasanya kita sosialisasi kepada orang tua. Setiap ada temuan dengan orang tua, itu kita sosialisasikan. Tujuannya itu supaya masyarakat tahu tentang pendidikan inklusif. Jadi, bentuknya sosialisasi ke masyarakat itu jadi melalui pertemuan-pertemuan sekolah dengan orang tua murid. Setiap kali pertemuan, pasti ada dibahas tentang pendidikan inklusif”.

Sekolah rutin melakukan sosialisasi kepada orang tua melalui pertemuan-pertemuan sekolah. Sosialisasi ini bertujuan agar orang tua dan masyarakat memahami tentang pendidikan inklusif. Setiap pertemuan dengan orang tua murid selalu membahas topik pendidikan inklusif.

Peneliti memperoleh salinan notulensi rapat komite sekolah yang menunjukkan bahwa pembahasan pendidikan inklusif telah menjadi agenda rutin. Dalam notulensi tertanggal 15 Maret 2025, dicatat bahwa komite menyetujui pengadaan alat bantu belajar untuk ABK melalui dana swadaya masyarakat.

A. Pembahasan

Berdasarkan teori yang dikemukakan dalam kajian teori pada BAB II, Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap keanekaragaman dan prinsip non-diskriminasi (Hasanah, 2025).

Temuan penelitian di SDN 3 Poka menunjukkan bahwa prinsip ini telah diupayakan melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi orang tua, guru, komite sekolah, dan masyarakat terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan inklusif. Orang tua misalnya hadir aktif dalam pertemuan sekolah dan berkomunikasi dengan guru, meskipun masih mengalami kendala dalam mendampingi anak di rumah karena keterbatasan pengetahuan. Hal ini selaras dengan pendapat Mulyono (Lestiawati, 2024) yang menekankan bahwa peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah.

Selain itu, teori partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas, seperti yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 9, juga tampak di SDN 3 Poka. Sekolah melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, kerja sama dengan LSM, hingga penyusunan rencana kerja bersama. Hal ini mendukung pendapat dalam kajian teori bahwa keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat luas (Tolinggi, 2024).

Namun, hambatan yang disebutkan dalam teori juga nyata terjadi di lapangan. Kurangnya fasilitas seperti kursi roda atau alat bantu dengar menunjukkan bahwa keterbatasan sarana prasarana masih menjadi kendala, sebagaimana diuraikan dalam teori yang menyebutkan tantangan pendidikan inklusif meliputi keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di SDN 3 Poka telah mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang ada dalam peraturan dan literatur, meskipun masih

memerlukan penguatan dalam aspek dukungan sarana prasarana dan kapasitas orang tua untuk mendampingi anak di rumah.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pendidikan Inklusif di SDN 3 Poka

Pendidikan inklusi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi memerlukan dukungan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa SDN 3 Poka telah melibatkan masyarakat melalui:

- a. Sosialisasi tentang pendidikan inklusi
- b. Kerja sama aktif dengan orang tua siswa ABK
- c. Koordinasi antara guru dan orang tua untuk pemantauan perkembangan siswa
- d. Pendampingan saat siswa melanjutkan ke sekolah menengah inklusi

Peran serta masyarakat ini sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Cohen & Uphoff, yang mencakup partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (Fikriyani, 2013)

Keputusan orang tua menyekolahkan anak di sekolah inklusi meskipun dengan keterbatasan fasilitas, mencerminkan dukungan moral dan komitmen terhadap pengembangan sosial anak. Ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada penerimaan sosial dan keterlibatan langsung masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara sekolah dan orang tua, serta pengakuan terhadap hak belajar setiap anak, SDN 3 Poka telah membangun ekosistem pendidikan inklusif yang partisipatif dan berkeadilan (Fauziah, 2024).

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 3 Poka merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan observasi awal, sekolah ini telah mulai menerima siswa berkebutuhan khusus dan mengintegrasikannya ke dalam kelas reguler. Dalam pelaksanaannya, guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan adaptif sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekolah juga berusaha menyediakan ruang kelas yang kondusif, serta

membangun komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua (Amany, 2024)

Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 3 Poka masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus, seperti alat bantu belajar, fasilitas fisik yang aksesibel, dan ruang layanan khusus. Selain itu, belum semua guru memiliki kompetensi khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus secara optimal, karena masih minimnya pelatihan terkait pendidikan inklusif (Raharja, 2025).

Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, maka pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 3 Poka akan semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang setara dan bermartabat bagi semua peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 3 Poka dilakukan melalui penyesuaian kurikulum, strategi pembelajaran yang fleksibel, serta penyediaan guru pendamping khusus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pembelajaran
Guru menyusun RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Setiap siswa ABK memiliki program pembelajaran individual (PPI) yang memuat tujuan pembelajaran yang realistis dan disesuaikan dengan kondisi mereka.
- 2) Pelaksanaan Pembelajaran
Guru menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan interaktif. Dalam kelas, guru menggunakan pendekatan kelompok dan individual, serta memberikan perhatian khusus kepada siswa ABK. Guru juga melakukan modifikasi materi dan tugas agar sesuai dengan kemampuan siswa.
- 3) Penilaian Pembelajaran
Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif dengan pendekatan yang adaptif. Siswa ABK dinilai berdasarkan kemampuan awal, proses, dan pencapaian yang sesuai dengan tujuan individual mereka.
- 4) Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Inklusif
Hasil wawancara dengan orang tua siswa di SDN 3 Poka menunjukkan bahwa

mereka memiliki pandangan yang positif terhadap pendidikan inklusif, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Berikut adalah rangkuman temuan dari wawancara tersebut:

- a) Langkah Peningkatan Keterlibatan Orang Tua
Orang tua merasa perlu adanya sosialisasi dan pelatihan rutin dari pihak sekolah agar mereka lebih memahami pendidikan inklusif. Dibutuhkan juga forum komunikasi antara guru dan orang tua untuk membahas kemajuan dan kebutuhan anak secara berkala.
- b) Tingkat Keterlibatan Orang Tua
Orang tua merasa cukup terlibat melalui pertemuan rutin dan komunikasi dengan guru. Namun mereka menyadari keterbatasan dalam mendampingi anak di rumah karena kurangnya pengetahuan khusus tentang kebutuhan anak mereka.
- c) Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Inklusif
Mereka berharap sekolah dapat meningkatkan fasilitas dan sumber daya untuk menunjang pembelajaran ABK, termasuk pelatihan intensif bagi guru.
- d) Peran Sekolah
Sekolah dinilai sudah cukup mendukung dengan adanya guru pendamping dan program khusus. Namun, komunikasi dengan orang tua dan pendekatan individual terhadap siswa masih bisa ditingkatkan.
- e) Tantangan yang Dihadapi Orang Tua
Tantangan utama yang dirasakan orang tua adalah kurangnya pengetahuan tentang cara mendampingi anak dan kesulitan anak dalam bersosialisasi dengan teman.
- f) Dukungan yang Diharapkan dari Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Mereka
Berharap ada kegiatan sosial yang melibatkan ABK dan bimbingan dari tenaga ahli seperti psikolog, serta komunitas yang mendukung orang tua siswa inklusif.
- g) Informasi dan Dukungan dari Sekolah

Informasi yang diterima orang tua masih dirasa umum dan belum sepenuhnya dapat diakses semua orang tua. Maka, mereka berharap adanya program pendampingan yang lebih terstruktur.

- h) Pengalaman dalam Pendidikan Inklusif
Secara umum, orang tua merasa puas karena anak-anak mereka menunjukkan perkembangan positif. Meskipun tidak signifikan, proses adaptasi anak berjalan seiring waktu.
 - i) Pandangan terhadap Program Pendidikan Inklusif
Para orang tua mendukung penuh pendidikan inklusif karena memberikan kesempatan belajar yang sama untuk semua anak.
 - j) Manfaat Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif dinilai sangat bermanfaat karena mendukung perkembangan sosial dan emosional anak serta meningkatkan kepercayaan diri mereka.
- 5) Tantangan dan Solusi
Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 3 Poka antara lain:
- a. Kurangnya tenaga pendidik khusus.
 - b. Keterbatasan sarana prasarana.
 - c. Masih adanya stigma terhadap ABK.
- 6) Solusi yang dilakukan antara lain:
- a. Pelatihan guru secara berkala.
 - b. Kerja sama dengan LSM untuk mendapatkan dukungan tambahan.
 - c. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.

2. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SDN 3 Poka

Pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 3 Poka telah mencerminkan prinsip dasar pendidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, tanpa diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sekolah menerima semua siswa dengan latar

belakang kemampuan berbeda. Pelaksanaan dimulai dengan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan khusus masing-masing anak, yang sejalan dengan konsep asesmen diagnostik dalam pendidikan inklusi (Sunardi et al., 2025). Asesmen ini menjadi dasar pemberian layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (Alfian, and Saputra 2025).

Selain itu, proses pembelajaran di SDN 3 Poka tidak memisahkan siswa ABK dari siswa reguler, namun menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Pendekatan ini sesuai dengan teori Tomlinson (2025) tentang diferensiasi pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan kemampuannya (Trisia and Meilana, 2025).

Meskipun pelaksanaan pendidikan inklusi menghadapi tantangan seperti keterbatasan guru dengan kompetensi khusus dan sarana-prasarana, sekolah tetap menunjukkan komitmen melalui kerja sama dengan SLB dan pelatihan guru secara internal. Ini mencerminkan praktik inklusif berkelanjutan yang disebut oleh Booth dan Ainscow (2024), yaitu perubahan budaya dan praktik sekolah untuk mendukung semua siswa (Jayanti and Umar, 2024).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Poka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SDN 3 Poka Pendidikan inklusif di SDN 3 Poka telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan menerima siswa berkebutuhan khusus (ABK) bersama siswa reguler dalam satu lingkungan belajar. Guru berupaya melakukan penyesuaian pembelajaran melalui modifikasi kurikulum, metode, serta pemberian layanan tambahan. Namun demikian, keterbatasan sarana prasarana dan pemahaman sebagian masyarakat masih menjadi tantangan yang dihadapi.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Masyarakat, terutama orang tua siswa, turut terlibat dalam perencanaan pendidikan inklusif melalui rapat komite, forum komunikasi, dan pertemuan orang tua-guru. Keterlibatan ini memperlihatkan adanya kepedulian serta dukungan terhadap program inklusi, meskipun masih terdapat kebutuhan akan peningkatan

pemahaman orang tua mengenai strategi pendampingan ABK di rumah.

Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Masyarakat berperan aktif dalam mendukung kegiatan sekolah, seperti gotong royong, dukungan moril maupun materiil, serta kerja sama orang tua dalam mendampingi anak di rumah. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut membantu melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan bagi guru serta orang tua, sehingga implementasi program inklusif menjadi lebih terarah.

Partisipasi dalam Pengawasan dan Evaluasi Bentuk keterlibatan masyarakat juga tampak dalam pengawasan dan evaluasi, misalnya melalui rapat rutin, forum diskusi, dan komunikasi dengan pihak sekolah. Masyarakat berperan memberikan masukan, kritik, serta saran dalam rangka perbaikan berkelanjutan. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di SDN 3 Poka tidak hanya ditentukan oleh pihak sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat, orang tua, dan lembaga terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah
Perlu meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan terkait strategi pembelajaran inklusif. Menyediakan sarana prasarana yang ramah ABK agar mendukung proses pembelajaran yang optimal. Membentuk forum komunikasi guru-orang tua untuk memperkuat kerja sama dalam mendampingi perkembangan anak.
2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat
Diharapkan lebih proaktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai pendidikan inklusif agar dapat memahami kebutuhan anak secara lebih tepat. Terus menjalin komunikasi dengan guru dan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak. Mendukung keberlanjutan program inklusif baik melalui tenaga, pemikiran, maupun sumber daya lainnya.
3. Bagi Pemerintah dan LSM
Pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran, fasilitas, dan kebijakan yang berpihak pada pendidikan inklusif. LSM diharapkan terus menjadi mitra strategis sekolah

dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan advokasi. Perlu adanya program sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus.

Daftar Pustaka

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018). hlm. 7.
- Alfian, Alfian, Imam Santosa, and Deny Surya Saputra. "Pelatihan Penerapan Strategi Pembelajaran Inklusif Bagi Guru Sekolah Dasar dalam Upaya Identifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus." *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4.2 (2025): 302-314.
- Amany, Khoirunnisa Mazaya Zata, and Bambang Nugroho. "Pendidikan indonesia saat ini dalam perspektif filosofi pendidikan inklusi, serta implementasinya dalam konsep merdeka belajar." 19 Jun. 2024,
- Dyah S. (2008). *Pengkajian Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. (online). Tersedia: http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_undangan/DYAH%20S_Pengkajian%20Pendidikan%20Inklusif.pdf
- Fauziah, Nursifa, et al. "Analisis Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus." *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 6.1 (2024): 73-82.
- Fikriyani, Mutia. "Evaluasi program rehabilitasi mangrove di pesisir desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak." *Ruang* 2.1 (2013): 81-90.
- Gustaman, Randy Fadillah, Agus Gandi, and Nani Ratnaningsih. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 13.1 (2025): 660-666.
- Harahap, Hendra Asri, Fadila Amelia, and Abdul Azis. "PERAN PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MENINGKATKANKUALITAS PENDIDIKAN BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS." *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi dan Humaniora* 2.1 (2025): 177-184.
- Herawati. 2021. Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Kusus. *Jurnal Edu Humaniora*. 2(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/eduhumaniora/article/view/2755>
- Jayanti, Mei Indra, and Umar Umar. "Penguatan Kompetensi Sosial Dan Emosional Siswa Melalui Pelatihan Guru Penggerak Di Bima." *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2024): 9-17.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. https://repositori.kemdikbud.go.id/24970/1/Panduan_Inklusif.pdf.
- Lestiawati, Dwi. *Keterlibatan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi*. Diss. IAIN KEDIRI, 2024.
- Nurfadhillah, Septy. *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2021.
- Purwanta, Edi. (2002). Pendidikan Inklusi. Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah PLB Tingkat Nasional Tahun 2002 di UPI tgl. 6-8 Agt.2002.
- Raharja, Tiara Hasna, Puji Astuti, and Lusia Astrika. "ANALISIS KINERJA SEKOLAH DASAR KOTA BANDUNG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI TAHUN 2023." *Journal of Politic and Government Studies* 14.2 (2025): 37-57.
- Rahmani, Sarah Azka, and Sahadi Humaedi. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN AMANAH FUND DI KAMPUNG DADAP DESA JATIMULYA, KECAMATAN KOSAMBI, KABUPATEN TANGERANG SELATAN, BANTEN
- Rizkiana, Rizkiana, Nuridin Nuridin, and Firdiansyah Alhabsyi. "Peranan Guru Dan Orang Tua Dalam Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Pada Pendidikan Inklusi." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIES)* 5.0 2.1 (2023): 201-206.
- Tolinggi, Rizkiyani Amelia, Isman Bruaharja, and Adiesty SP Syamsuddin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan." *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2024): 25-38.
Trisia, Dina, and Septi Fitri Meilana.
"Pengembangan Kurikulum Pendidikan

Inklusi Berbasis Diferensiasi di Sekolah Dasar." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.01 (2025): 1087-1096.